

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi ini diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005. Dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah salah satu prinsip akuntansi adalah pengungkapan lengkap full disclosure, dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka laporan keuangan ataupun pada catatan atas laporan keuangan (CALK) (Syafitri, 2012).

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan, mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai:

1. Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan.
2. Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan.
3. Alat komunikasi dengan publik.

Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas

pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016).

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran di daerah mereka masing-masing. Namun kenyataannya, masih banyak pengangguran pada kabupaten dan kota provinsi Lampung. Dapat dilihat fenomena dari data BPS, kabupaten dan kota yang paling tinggi tingkat pengangguran terbuka ada pada kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dengan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,85%. Pada tahun 2017-2019 sempat turun dan kembali naik lagi pada tahun 2020-2021 dikarenakan pandemi covid-19 dan mengakibatkan para pekerja yang di PHK dan ada juga sebagian karyawan dan pekerja yang kerja dirumah atau biasa disebut WFH (Work From Home).

Penurunan yang terjadi baik pada Pendapatan transfer maupun PAD berdasarkan data yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, realisasi PAD Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yang cukup drastis yang diakibatkan karena Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi sektor perekonomian terutama sektor usaha dan jasa. Hal ini membuat para pengusaha merugi dan hal ini

tentunya berdampak pada turunnya jumlah pajak dan retribusi daerah yang diterima pemerintah daerah. Hal ini membuat kinerja keuangan daerah kota/kabupaten di provinsi Lampung terlihat menurun (Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung, 2021).

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pertumbuhan nilai tambah yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah, infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD dan intergovernmental revenue juga menambah belanja modal pemerintah daerah tersebut (Simanullang, 2013). Halim (2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan yang diterima daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.

Sehingga hal tersebut akan membuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurun ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Ukuran pemerintah daerah bisa menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat, akan akuntabilitas akan semakin besar sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variable dalam besar atau kecilnya pemerintah suatu daerah yang dapat diukur melalui total asset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas yang menyatakan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total asset memiliki pengaruh terhadap kinerja keungan daerah.

Kemudian faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah leverage. Leverage merupakan pinjaman modal atau utang. Leverage adalah pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan bagi suatu perusahaan maupun investasi. Pada akuntansi sektor publik, leverage ialah rasio untuk menentukan besar kecil suatu daerah bergantung ke kreditur dalam mendanai aset daerah mereka. Daerah dengan leverage tinggi, maka mereka cenderung memiliki kebergantungan ke pinjaman luar dalam mendanai aset. Hitungan rasio leverage bagi pemerintah berperan vital bagi kreditur maupun calon kreditur selama menentukan keputusan dalam memberikan kredit. Rasio ini hendak dipergunakan kreditur untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utang mereka. Debt to equity ratio (DER) atau rasio utang kepada modal berguna sebagai pengukur besar kecil aset milik daerah yang dibebani oleh utang dengan melakukan perbandingan total utang terhadap jumlah keseluruhan aktiva daerah. Hasil yang diperoleh akan kreditur gunakan untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah selama membayarkan utang mereka. rasio ini memberi indikasi besar kecil utang yang membebani pemerintah daerah itu. Kian tingginya leverage, tentu bisa disebut kinerja keuangan daerah kian memburuj. Dengan begitu, daerah itu

belum bisa mendanai operasional mereka sehingga masih memerlukan pinjaman dari pihak lain (Manafe, 2023).

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Rahayu, 2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Pada penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hal ini dapat mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini adalah penambahan variabel yaitu dana Perimbangan dan leverage dan studi kasus dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Penambahan variabel tersebut, didasarkan pada penelitian (Pratiwi, 2019) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta adanya perbedaan studi kasus yang dilakukan pada pemerintah daerah kota bandar lampung. Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Penelitian ini hanya membahas apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu

akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca menyediakan informasi terkait pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan leverage dalam hubungannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dapat digunakan bagi penulis, bagi instansi-instansi atau pihak lain.

#### **b. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah. Dana perimbangan dan juga leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan menuliskan bab yang terdiri atas lima bab. Dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang “pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan judul penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan refrensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi tentang informasi lebih lanjut bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber.

### **LAMPIRAN**

Bagian ini berisi tentang data yang mendukung pembahasan uraian data yang berisikan penjelasan.